

# KEBIJAKAN PENGEMBANGAN RUMPUT LAUT DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

Maryadi

Pusat Pengkajian Kebijakan Peningkatan Daya Saing, BPPT.

Gedung BPPT II Lantai 11, Jl. MH. Thamrin 8 Jakarta 20340

E-mail: Maryadi@yahoo.com

## Abstract

*One of Development Program in Maluku Tenggara Barat Regency is helping people in coastal poorest areas. The program is helping coastal farmers make their seaweed production and processing more profitable and their marketing networks more transparent. It was suggested that local government should has a policy to push out coastal farmers a "new seedling" and best practices method, such as bigger size of seedling, appropriate attachment spacing, daily tender loving care and proper drying practices by using platforms and/or hanging systems. The aim is to improve productivity and product quality to attract better prices.*

**Kata kunci:** kebijakan, rumput laut, Maluku Tenggara Barat

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Salah satu kekayaan alam yang dimiliki oleh Kabupaten Maluku Tenggara Barat adalah wilayah laut yang mengelilinginya. Wilayah Maluku Tenggara Barat sebagian besar berupa samudera yang di dalamnya terdapat berbagai ragam jenis ikan dan kekayaan alam lain. Meskipun demikian, pemanfaatan potensi kelautan di kabupaten itu belum optimal. Potensi kelautan yang ada sebagian besar masih digunakan untuk perikanan saja, padahal potensi kelautan tadi dapat digunakan untuk budidaya rumput laut yang nilai ekonominya cukup tinggi (Departemen Kelautan dan Perikanan, 2005:2).

Rumput laut merupakan salah satu komoditas perdagangan internasional. Jenis rumput laut yang cocok untuk dibudidayakan adalah jenis *Euचेuma spp.* (*E.cottonii* dan *E. spinosum*) di tanam di laut, dan jenis *Gracilaria spp.* ditanam di tambak (Anggadiredja, 2007:2). Kabupaten Maluku Tenggara Barat memiliki potensi area untuk budidaya rumput laut seluas 5.103,88 hektar, namun baru sekitar 50,00 hektar yang dimanfaatkan. Dengan demikian masih terdapat 5.053,88 hektar potensi laut yang belum tergarap (DKP Maluku Tenggara Barat, 2010: 4).

Mengingat pentingnya upaya pembudidayaan rumput laut, diharapkan pengembangan agroindustri berbasis rumput laut dapat dijadikan sebagai strategi percepatan pembangunan yang diharapkan dapat menurunkan tingkat kemiskinan

dan menurunkan tingkat pengangguran di masa mendatang. Menurut Dillon (1999:5), *resources based industries* sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu unggulan komparatif yang berpotensi menjadi keunggulan kompetitif untuk menggerakkan perekonomian rakyat.

### 1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari kajian ini adalah merumuskan kebijakan dan rekomendasi kebijakan pengembangan rumput laut di Kabupaten Maluku Tenggara Barat berdasarkan pada kondisi nyata di lapangan.

Sedangkan tujuan kajian ini di antaranya adalah (1) merumuskan model, strategi dan rekomendasi untuk pengembangan komoditas rumput laut di Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dan (2) menyusun program dan rencana aksi pengembangan komoditas rumput laut di Kabupaten Maluku Tenggara Barat dari hulu hingga hilir.

### 1.3. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kajian adalah analisis data dan informasi kondisi saat ini tentang budidaya rumput laut di Kabupaten Maluku Tenggara Barat, untuk dikembangkan menjadi komoditas unggulan yang dapat diandalkan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan komoditas unggulan dilakukan untuk mencapai nilai ekonomi dan sosial yang tinggi melalui perencanaan, implementasi dan pengendalian

yang terpadu.

## 2. BAHAN DAN METODE

Metode yang digunakan dalam kajian ini bersifat deskriptif untuk menjelaskan elemen-elemen yang berhubungan dengan kegiatan budidaya rumput laut di Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Sedangkan pendekatannya bersifat induktif untuk mendapatkan kejelasan mengenai elemen-elemen yang membentuk sistem budidaya dan tata niaganya. Pendekatan yang bersifat induktif dilakukan melalui *Focus Group Discussion* (FGD) dimana peserta bebas untuk berbicara dan menyampaikan pendapatnya dalam batasan untuk mengembangkan industri rumput laut. FGD dilakukan pada tanggal 23 Nopember 2010 di Desa Lematang dan 24 Nopember 2010 di Saumlaki.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Kondisi Saat Ini

#### 3.1.1. Budidaya Rumput Laut

Kabupaten Maluku Tenggara Barat merupakan daerah kepulauan yang mempunyai luas 52.995,20 km<sup>2</sup>, terdiri dari wilayah daratan seluas 10.102,92 km<sup>2</sup> (19,06%) dan wilayah laut seluas 42.892,28 km<sup>2</sup> (80,94%). Dengan garis pantai sepanjang 1.626,27 km, kabupaten ini memiliki hamparan potensial untuk budidaya rumput laut seluas 21.979,93 hektar yang terdapat di sembilan kecamatan. Luas hamparan di setiap kecamatan disajikan pada Tabel 1.

**Tabel 1.** Luas "Hamparan" Budidaya Rumput Laut di Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Oktober 2010

Kecamatan	Luas Hamparan (ha)	Sudah Dimanfaatkan		Belum Dimanfaatkan	
		ha	%	ha	%
Selaru	2.464,53	707,14	28,69	1.757,39	71,31
Tanimbar Selatan	1.382,08	110,01	7,96	1.272,07	92,04
Wermaktian	5.720,35	119,03	2,08	5.601,32	97,92
Wertamrian	2.597,38	5,72	0,22	2.591,66	99,78
Wuarlabobar	755,92	184,08	24,35	571,84	75,65
Kormomolin	374,78	5,89	1,57	368,89	98,43
Nirunmas	750,93	6,34	0,84	744,59	99,16
Tanimbar Utara	7.805,26	283,07	3,63	7.522,19	96,37
Yaru	128,7	0	0,00	128,7	100,00
Jumlah	21.979,93	1.421,28	6,47	20.558,65	93,53

Sumber : DKP Kabupaten Maluku Tenggara Barat, 2010,

Secara keseluruhan, pemanfaatan potensi hamparan budidaya rumput laut di Kabupaten Maluku Tenggara Barat hingga Oktober 2010

masih sangat kecil. Dari luas hamparan potensial 21.979,93 hektar, baru dimanfaatkan seluas 1.421,28 hektar (6,47%). Kecamatan Tanimbar Utara memiliki luas hamparan potensial terbesar.

Budidaya rumput laut di Maluku Tenggara Barat secara umum dilakukan dengan metode *long line* atau tali apung. Metode *long line* adalah metode budidaya dengan menggunakan tali panjang yang dibentangkan. Metode ini menggunakan tali sepanjang 50-100 meter yang pada kedua ujungnya diberi jangkar dan pelampung besar, setiap 25 meter diberi pelampung utama yang terbuat dari drum plastik atau styrofoam. Pada setiap jarak lima meter diberi pelampung berupa botol kosong bekas air minum dalam kemasan 500 ml.

Sejak dilakukannya pembudidayaan rumput laut secara serius pada tahun 2007, produksi rumput laut di Kabupaten Maluku Tenggara Barat kian meningkat dari tahun ke tahun. Hingga Oktober 2010, jumlah produksi rumput laut kering yang terkumpul sudah lebih dari 1.000 ton. Jumlah ini meningkat hampir 50% dibandingkan tahun 2009 (DKP Maluku Tenggara Barat, 2010:2.)

#### 3.1.2. Pemasaran

Pemasaran rumput laut di Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada umumnya dilakukan dengan sistem "ijon". Sebelum masa panen, para pembudidaya didatangi oleh pedagang yang memberikan pinjaman uang senilai hasil rumput laut saat panen nantinya. Pada saat panen, para pembudidaya menyerahkan semua hasil panen kepada pedagang yang memberi pinjaman. Praktik semacam ini terjadi karena para pembudidaya kesulitan untuk mengakses permodalan. Menurut Sukadi (2007:6) kondisi seperti ini umum terjadi di seluruh Indonesia.

Cara pemasaran lainnya adalah dipasarkan secara langsung ke pedagang/pengumpul. Dengan cara ini, para pembudidaya harus membawa rumput laut ke pasar atau ke kota dan menanggung biaya pengangkutan yang tidak murah. Biaya pengangkutan per karung (sekitar 60 kilogram) mencapai Rp30.000, atau Rp500 per kilogram. Harga jual dari pembudidaya ke pedagang adalah Rp6.000 (per 13 November 2010). Pembudidaya hanya memperoleh Rp5.500 per kilogram. Mahalnya biaya pengangkutan disebabkan oleh sulitnya jalur transportasi, dimana ruas jalan darat masih banyak yang belum diaspal dan rusak.

### 3.1.3. Pengadaan Prasarana dan Sarana Produksi

Secara umum prasarana dan sarana produksi relatif mudah diperoleh di kota Saumlaki yang jaraknya dan waktu tempuhnya berbeda-beda dari setiap kecamatan. Di banyak tempat, ketersediaan bibit dikeluhkan karena sulit mendapatkannya, namun tidak begitu halnya di Saumlaki. Hal ini karena bibit rumput laut dapat diperoleh dari hasil panen dengan seleksi yang cukup ketat. Bibit yang diperoleh dengan cara demikian selama ini belum menjadi kendala karena produktivitasnya belum dirasakan penurunannya. Sarana produksi yang masih menjadi kendala adalah perahu kano yang dipakai untuk perawatan, pengangkutan dan panen.

### 3.1.4. Proses Budidaya

Permasalahan yang terjadi pada proses budidaya terkait dengan pengadaan prasarana dan sarana. Pemeliharaan rumput laut menjadi tidak optimum karena sarannya berupa perahu atau kano untuk kegiatan pemeliharaan tidak memadai. Akibatnya, pembersihan kotoran yang terbawa arus menjadi tidak optimum. Demikian juga dalam penyulaman, pembedulan *long line* dan pelampung.

Seperti telah dikemukakan sebelumnya, introduksi budidaya rumput laut di Kabupaten Maluku Tenggara Barat baru dimulai tahun 2007. Oleh karena itu, penguasaan teknologi budidaya rumput laut masih sangat terbatas. Sementara itu, lembaga-lembaga yang berperan sebagai pendamping pembudidaya untuk melakukan budidaya belum tersedia. Hal ini mengakibatkan produksi dan mutu rumput laut yang dihasilkan belum optimal.

### 3.1.5. Panen dan Pascapanen

Permasalahan yang dihadapi pada saat panen adalah masih banyaknya sampah dan bahan ikutan lain yang menyebabkan kandungan kotoran dan benda asing rumput laut yang di panen masih tinggi, sehingga mengurangi mutu dan harga jual. Sedangkan persoalan pascapanen adalah proses pengangkutan yang terkendala oleh ketiadaan perahu/kano.

## 3.2. Alternatif Pengembangan

Berdasarkan kondisi nyata (*existing condition*) di lapangan, maka dalam rangka pengembangan wilayah di Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan sekaligus untuk pengentasan kemiskinan, perlu adanya suatu kebijakan pengembangan budidaya

rumpun laut yang komprehensif yang didasarkan pada suatu perencanaan atau rencana aksi yang baik dan dipahami oleh semua pihak.

Untuk mencapai sasaran seperti itu, pengembangan komoditas rumput laut di Kabupaten Maluku Tenggara Barat tidak bisa diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Pemerintah daerah maupun pusat harus “campur-tangan” dengan menetapkan berbagai regulasi yang memudahkan para pembudidaya rumput laut untuk mendapatkan akses di segala bidang, membangun prasarana transportasi, memberikan bimbingan dan penyuluhan, serta melakukan pemantauan praktik bisnis agar tidak terjadi marginalisasi pembudidaya rumput laut.

Menurut Putro (2007:3) globalisasi yang menggaungkan pasar bebas harus diredam dan dinetralisir oleh pemerintah. Dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, perlu diterbitkan regulasi yang benar-benar berpihak pada kaum marginal. Keberpihakan ini bukan berarti proteksi, tetapi diarahkan pada upaya mengangkat potensi dan meningkatkan keberdayaan masyarakat luas. Dengan keberdayaan yang makin mandiri, dapat meningkatkan posisi tawar masyarakat, sehingga memperoleh penghasilan yang tinggi. Penghasilan yang tinggi tentunya diharapkan dapat makin meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat yang sejahtera tentunya memiliki potensi yang kuat. Demikian seterusnya dan masyarakat akan makin sejahtera.

### 3.2.1. Kebijakan dan Langkah Pengembangan

Untuk mencapai sasaran di atas, maka kebijakan yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat di antaranya adalah :

1. Menerbitkan peraturan yang memberi kemudahan bagi pembudidaya rumput, termasuk di antaranya pembuatan peraturan daerah terkait dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Pesisir dan Laut.
2. Menerbitkan peraturan tentang harga terendah komoditas rumput laut agar tidak terjadi fluktuasi harga yang merugikan para pembudidaya.
3. Menyediakan anggaran untuk membantu pengadaan dan/atau pembaharuan peralatan usaha (teknologi budidaya).
4. Melakukan pembersihan kawasan pantai di seputar lokasi budidaya rumput laut secara berkala.
5. Membentuk BUMD Pengolahan Rumput Laut di Lematang, dan mendirikan pabrik sejenis di kecamatan lain seperti Tanimbar Utara.

6. Menyediakan prasarana dan sarana transportasi untuk melancarkan arus mobilisasi barang dan orang antardesa, antarkecamatan dan antarpulau.
7. Mendorong dilakukannya ekstensifikasi lahan budidaya rumput laut yang masih bersifat potensial dan intensifikasi lahan yang sudah dimanfaatkan.
8. Mengintensifkan bimbingan dan penyuluhan budidaya rumput laut masyarakat pesisir.
9. Memberikan pengetahuan dan pelatihan pembuatan produk dari bahan dasar rumput laut kepada masyarakat agar bernilai tambah lebih tinggi.
10. Memfasilitasi pameran hasil produksi berbahan dasar rumput laut agar dikenal oleh masyarakat luas, baik di wilayah Maluku, Indonesia maupun internasional.
11. Membuat situs khusus untuk mengenalkan rumput laut Kabupaten Maluku Tenggara Barat kepada dunia.

Mengingat luas hamparan rumput laut yang dimanfaatkan baru 1.421,28 hektar (6,47%) dan masih ada seluas 20.558,65 hektar (93,53%) yang belum digarap, maka untuk jangka pendek perlu dilakukan program ekstensifikasi. Program ekstensifikasi dapat menyerap tenaga kerja banyak, sehingga diharapkan mampu mengurangi jumlah pengangguran. Pada tahun 2009 tercatat angka pengangguran sebanyak 3.406 orang (BPS Kabupaten Maluku Tenggara Barat, 2009:7). Guna menghindari tumpang tindih kepentingan dengan program lain, maka perlu segera disusun Zonasi atau Tata Ruang Laut dan Pesisir agar kepastian hukumnya menjadi lebih jelas.

Selain mampu mengurangi pengangguran, program tersebut diharapkan akan meningkatkan produksi rumput laut. Masalah yang perlu ditindaklanjuti adalah bagaimana meningkatkan nilai tambah rumput laut bagi para pembudidaya agar mereka tidak menghadapi fluktuasi harga.

Berdasarkan kondisi yang ada saat ini, diketahui bahwa penyerapan tenaga kerja rata-rata per hektar hamparan budidaya rumput laut sebanyak 6-7 orang. Hasil perhitungan penyerapan tenaga kerja rata-rata per hektar didasarkan pada kondisi riil akhir November 2010. Dengan menggunakan dasar rata-rata tenaga kerja per hektar 6 orang, maka luas hamparan baru yang dapat segera dibuka adalah seluas 568 hektar. Lokasi pembukaan hamparan baru diutamakan di Tanimbar Utara karena kecamatan ini memiliki hamparan potensial paling luas yang belum dimanfaatkan (7.522,2 hektar) dan memiliki jumlah penduduk sekitar 14.150 jiwa (kedua

terbanyak setelah Kecamatan Tanimbar Selatan).

### 3.2.2. Alternatif Kegiatan

Alternatif kegiatan disusun dan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan kebutuhan pengembangan sebagaimana dicantumkan dalam rekomendasi dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Alternatif kegiatan ini disusun untuk jangka waktu dua tahun ke depan sesuai dengan prioritas pengembangannya, disajikan pada lampiran 1. Alternatif kegiatan ini diharapkan pula dapat menjadi program beberapa instansi terkait di tingkat pusat, seperti Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

## 4. KESIMPULAN

Rumput laut merupakan komoditas yang sangat potensial untuk dikembangkan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Dari segi budidaya, rumput laut sangat mudah untuk dikembangkan karena tidak menuntut tingkat keterampilan tinggi, sehingga dapat dilakukan oleh semua anggota keluarga nelayan. Pangsa pasar rumput laut juga sangat luas, baik dalam ataupun luar negeri. Bahkan untuk tingkat konsumsi (pasar) taraf lokalpun para pembudidaya masih belum mampu untuk mencukupinya, belum lagi ditambah permintaan luar negeri yang kian hari semakin meningkat.

Dengan berkembangnya aktivitas budidaya rumput laut, keuntungan yang bisa didapatkan di antaranya adalah berkurangnya jumlah pengangguran, meningkatnya pendapatan masyarakat dan bertambahnya pendapatan asli daerah (PAD), yang pada akhirnya akan menciptakan kesejahteraan hidup masyarakat.

Wilayah pesisir dan laut yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara Barat sangat potensial untuk dikembangkan sebagai sentra produksi rumput laut, namun karena saat ini jumlah pembudidayanya masih sangat sedikit, diperlukan langkah-langkah atau kebijakan agar dalam waktu yang relatif singkat jumlah pembudidayanya bertambah secara nyata. Selain itu, kuantitas dan kualitas hasil yang diperoleh dapat memenuhi kebutuhan pasar.

Kebijakan pertama yang perlu dilakukan adalah adanya peraturan yang jelas tentang zonasi wilayah yang digunakan untuk budidaya rumput laut. Kegiatan ini penting karena dapat menghindari tumpang tindih dengan kegiatan lain di masa yang akan datang.

Kebijakan lain yang tidak kalah penting adalah

penyediaan tenaga penyuluh. Seperti diketahui, budidaya rumput laut di Kabupaten Maluku Tenggara Barat relatif masih baru, yaitu dimulai pada tahun 2007. Sejak dicanangkan budidaya sampai sekarang, dapat dikatakan pembudidaya bekerja tanpa panduan teknis yang baik dan benar. Mereka banyak belajar dari orang-orang yang datang ke daerahnya dengan segala keterbatasan informasi yang dimiliki oleh orang-orang itu. Agar budidaya rumput laut ini dapat berkembang dengan baik, sangat diharapkan adanya tenaga penyuluh yang dapat lokal bantuan teknis budidaya secara baik dan pengolahan setelah panen dengan baik pula. Dengan bantuan teknis semacam ini rumput laut yang dihasilkan akan memiliki nilai jual yang tinggi.

Sedangkan untuk kegiatan pemasaran dapat dikatakan tidak ada masalah karena kebutuhan pasar lokal, regional dan dunia akan rumput laut masih sangat tinggi. Hal lainnya yang diperlukan adalah adanya informasi harga agar mereka tidak dipermainkan oleh pedagang atau tengkulak.

#### DAFTAR PUSTAKA

Anggadireja, J.T., 2007. *Potential and Prospect of Indonesia Seaweed Industry Development*. Indonesia Seaweed Society, Jakarta.

BPS Kabupaten Maluku Tenggara Barat, 2009. Kabupaten Maluku Tenggara Barat Dalam Angka. Kantor Biro Statistik Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Departemen Kelautan dan Perikanan, 2005. *Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.17/MEN/2005 Tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Departemen Kelautan dan Perikanan Tahun 2005-2009*. Jakarta.

Dillon, H.S., 1999. "Strategi Pemulihan Ekonomi Indonesia Melalui Pengembangan Agribisnis." *Majalah Agribisnis, Manajemen dan Teknologi*, Vol. 5 No. 1, IPB-Bogor.

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, 2010. *Potensi Kelautan dan Perikanan Kabupaten Maluku Tenggara Barat*. Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Putro, S. 2007. "Peluang dan Prospek Pemasaran Rumput Laut Indonesia di Tingkat Global." *Makalah*, disampaikan pada Seminar Kebijakan Investasi Bidang Pengolahan dan sasaran Hasil Perikanan, Direktorat Jenderal P2HP DKP.

Sukadi, F., 2007. "Pengembangan Budidaya Rumput Laut di Indonesia." *Makalah*, disampaikan pada Seminar Kebijakan Investasi Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan. Direktorat Jenderal P2HP DKP.

